

Tantangan Etika dalam Pengelolaan Anggaran Negara pada Era Transformasi Digital

Rizha Fahmi Ramadhani*, Salsabila Nabilah Aliyah

Universitas Airlangga

Email: rizha.fahmi.ramadhani.385751-2022@feb.unair.ac.id

Received: 27-12-23 ; Revised: 20-06-24; Accepted:14-07-24

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah tantangan dan strategi pengelolaan anggaran negara. Era ini menempatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keamanan data sebagai fokus utama. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya melalui adopsi teknologi informasi, memperlihatkan peluang untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan etika, terutama terkait dengan keamanan data. Keberhasilan transformasi digital membutuhkan kepemimpinan yang etis, memahami risiko keamanan data, dan penerapan kebijakan yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi meningkatkan efektivitas layanan publik, namun juga memperkenalkan tantangan etika, khususnya terkait keamanan data. Kepemimpinan etis dan penerapan kebijakan yang ketat adalah kunci untuk menjaga integritas. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret, seperti layanan interaktif digital, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memastikan transparansi. Pentingnya integritas dan keamanan data diakui sebagai titik sentral, dengan kebijakan dan praktik yang mendukung keamanan informasi. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi peran teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, dalam meningkatkan transparansi dan keamanan data dalam pengelolaan anggaran negara.

Kata kunci: transformasi, digital, anggaran, teknologi, etika, integritas.

Abstract

Digital transformation has reshaped the challenges and strategies of managing national budgets. This era places transparency, accountability, integrity, and data security as its primary focus. The significance of transparency and accountability in the management of national finances, particularly through the adoption of information technology, presents opportunities to enhance the effectiveness of public services. However, these changes also bring ethical challenges, especially concerning data security. The success of digital transformation requires ethical leadership, an understanding of data security risks, and the implementation of stringent policies. This Study using library research methods with a qualitative approach. This study gathers secondary data from books, journal articles, and official documents. The findings show that adopting information technology enhances the effectiveness of public services, but also introduces ethical challenges, particularly concerning data security. Ethical leadership and stringent policy implementation are key to maintaining integrity. The government needs to take concrete steps, such as interactive digital services, to increase public engagement and ensure transparency. The importance of integrity and data security is recognized as central, with policies and practices supporting information security. Further research can explore the role of new technologies, such as artificial intelligence, in enhancing transparency and data security in the management of national budgets.

Keywords: transformation, digital, budget, technology, ethics, integrity

* Alamat Korespondensi

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu aspek krusial dalam membangun dan mengembangkan suatu negara. Proses tersebut melibatkan perencanaan, pengalokasian, pengeluaran, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana publik oleh pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada tantangan etika yang semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dalam era transformasi digital.

Di Indonesia, integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering dipertanyakan, terutama ketika terjadi kasus pelanggaran etika publik yang terekspos media dan menjadi viral. Etika publik sejatinya merupakan standar yang dapat menentukan suatu tindakan baik atau buruk di dalam ranah pelayanan publik (Sumarto, 2017). Perilaku dan sikap para pimpinan di sektor pemerintahan juga menjadi cerminan bagi aparat birokrasi dan masyarakat di wilayahnya. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, pemahaman dan penghayatan akan etika menjadi kunci untuk menjaga integritas. Etika adalah bagian dari

ilmu filsafat mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak (Briando & Purnomo, 2019). Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan yang mendekat kepada rakyat diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat (Nikmatuniayah, 2015).

Perubahan ini sejalan dengan Revolusi Industri 4.0 yang membawa lima pilar transformasi digital, seperti *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, dan *Additive Manufacturing* (Jumading, 2021). Transformasi digital menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan prima yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara juga membawa risiko terkait etika, terutama dalam pengelolaan pelayanan publik. Pelayanan publik yang akuntabel merupakan bentuk pelayanan prima yang menjadi keharusan dan tidak bisa ditunda-tunda serta diawali dari perlu dibangkitkannya kembali kesadaran dalam pemahaman etika (Nikmatuniayah, 2015).

Pelayanan publik sebagai amanat konstitusi mengandalkan dua aktor utama, yaitu pemerintah sebagai penyedia dan masyarakat sebagai pengguna (Mulyawan &

Mariana, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi (TI) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, serta mengurangi risiko korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Afriana *et al.*, 2020). Perkembangan teknologi informasi ini juga membawa dampak terhadap tata kelola dan etika pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan anggaran belanja negara merupakan aspek penting yang tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan keuangan negara yang terbatas, belanja negara harus dilakukan secara efektif dan efisien agar memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat (Tantyo, 2020). Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Kemenkeu) bahwa teknologi digital hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam fungsi penerimaan, pengeluaran, dan manajemen pembiayaan utang.

Meskipun teknologi digital membawa potensi manfaat yang besar, tantangan etika dalam pengelolaan anggaran negara tetap menjadi isu utama. Transformasi digital di sektor pemerintahan dan bisnis tidak hanya

didorong oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh disrupsi seperti peristiwa pandemi Covid-19 dan tuntutan daya saing global (Nastoto, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menghadapi tantangan etika ini agar pengelolaan anggaran negara dalam era transformasi digital dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Transformasi digital telah menjadi fenomena dominan dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan anggaran negara. Pemahaman mendalam mengenai konsekuensi etika dari perubahan ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Artikel ini dipacu oleh keinginan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan dampak transformasi digital terhadap praktik etis dalam pengelolaan anggaran negara. Melihat kompleksitas isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, adopsi teknologi keuangan, dan keamanan data, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam kepada pemerintah, instansi keuangan negara, dan akademisi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan data dari sumber-sumber pustaka

(Zed, 2008). Proses eksplorasi informasi mencakup pencarian dan pengumpulan artikel, buku, literatur, dan dokumen dari berbagai sumber pustaka. Tujuan dari metode ini adalah untuk membangun landasan teori yang kuat mengenai transparansi, akuntabilitas, adopsi teknologi keuangan, keamanan data, dan etika dalam pengelolaan anggaran negara. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap isu-isu yang diteliti.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku, artikel, dan sumber resmi lainnya yang keasliannya terjamin (Yusuf, 2014). Data dikumpulkan melalui telaah literatur dan bahan pustaka yang relevan, termasuk buku dan artikel jurnal yang membahas isu-isu transparansi, akuntabilitas, adopsi teknologi keuangan, keamanan data, dan etika dalam pengelolaan anggaran negara.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kejadian dengan tepat dan akurat. Teknik analisis mencakup analisis dokumen, catatan historis, dan buku (Yusuf, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1) Pengelolaan Anggaran di Era Transformasi Digital

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi fokus utama di tengah transformasi digital yang mengubah berbagai aspek kepentingan publik. Briando & Purnomo (2019) menyoroti pentingnya kejujuran sebagai landasan bagi pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya. Mereka menekankan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan oleh pengelola keuangan harus dihayati sebagai amanah yang disaksikan oleh Tuhan, bukan hanya manusia. Transparansi melibatkan keterbukaan dan kejujuran dalam setiap tindakan pengelolaan anggaran.

Perubahan teknologi telah memainkan peran penting dalam mendorong transparansi. (Gafar, 2017) menekankan bahwa teknologi memberikan kesempatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan. Selain itu, (Afriana *et al.*, 2020) menyoroti peran teknologi informasi dalam mengurangi kesenjangan korupsi dengan memberikan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah.

Di sisi lain terdapat tantangan dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan strategik organisasi yang semakin kompleks akibat dari kemajuan teknologi dan informasi yang tidak terbendung lagi (Nukman, 2014).

Berbagai perubahan dalam era transformasi digital juga membawa tantangan etika dalam pengelolaan anggaran. Etika merupakan landasan utama dalam menjalankan kegiatan profesionalitas agar memiliki tanggungjawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik (Irmayanti *et al.*, 2021). Pemimpin dan pengelola keuangan harus memahami konsekuensi etika dari penggunaan teknologi, terutama dalam hal pengamanan data. Dalam menghadapi tantangan ini, (Nastoto, 2023) menyoroti pentingnya kepemimpinan digital yang dapat mengawal transformasi, memahami perubahan budaya, dan memastikan adopsi teknologi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

2) **Kepemimpinan Digital dan Reformasi Birokrasi**

Dampak adopsi teknologi keuangan terhadap etika pengelolaan anggaran negara juga menjadi perhatian. (Jumading, 2021) mengamati bahwa pandemi Covid-19 telah mempercepat digitalisasi layanan publik, termasuk keuangan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan teknologi dalam tata kelola keuangan dan layanan publik memerlukan pemahaman etika yang mendalam. Selain itu, Briando & Purnomo (2019) menyoroti pentingnya upaya pengelolaan anggaran negara yang baik untuk

menjaga integritas dan transparansi.

Dalam merespons tantangan ini, pemerintah perlu menjalankan peran aktif dalam memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas. (Tantyo, 2020) menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal dan eksternal sebagai mekanisme kontrol suatu organisasi. Sujadi *et al.* (2022) juga menekankan perlunya inovasi dalam mekanisme antikorupsi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Mufti *et al.* (2019) menyoroti perlunya reformasi birokrasi untuk mengatasi tantangan seperti kualitas birokrat yang rendah dengan wujud upaya multidimensi yang mencakup tataran sistem, kebijakan, dan teknis.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara menjadi krusial di era transformasi digital. Transformasi digital mempercepat proses pengelolaan anggaran negara dan layanan publik, namun keberhasilannya harus diiringi dengan langkah-langkah konkret dalam memperkuat transparansi. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan layanan interaktif melalui *platform* digital, seperti *email*, *WhatsApp*, media sosial, dan aplikasi teknologi informasi keuangan lainnya (Jumading, 2021). Langkah ini dapat meningkatkan keterlibatan

masyarakat dan memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan anggaran dapat diakses dengan lebih mudah.

Integritas dan keamanan data menjadi titik sentral dalam menghadapi perubahan teknologi. Kepemimpinan digital penting dalam memastikan integritas dan keamanan data. Pemimpin yang memahami risiko keamanan data dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang mendukung keamanan informasi. Seiring dengan itu, (Supriyanto, 2016) menyoroti bahwa sistem informasi harus dikelola dengan baik dan data harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan dinamika pembangunan dan masyarakat.

3) Tantangan dan Strategi Pengelolaan Anggaran di Era Transformasi Digital

Tantangan keamanan data dalam pengelolaan anggaran memerlukan pendekatan yang holistik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi harus disertai dengan upaya untuk melindungi data. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi juga menjadi hal yang penting untuk dipahami (Agustini, 2021). Perlu berbagai strategi dalam menjaga keamanan data, sehingga pengelolaan anggaran pada era transformasi digital ini dapat berlangsung dengan aman dan bebas dari praktik-praktik

korupsi. Strategi untuk meningkatkan integritas dan keamanan data perlu dirancang dengan seksama.

Tantangan etika dalam pengelolaan anggaran negara di era transformasi digital menjadi suatu aspek yang tidak dapat diabaikan. Masih terdapat oknum aparatur yang cenderung terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan norma-norma dan etika, terutama saat menghadapi godaan harta dan kekuasaan. Selain itu, adopsi teknologi keuangan juga membawa dampak signifikan terhadap etika pengelolaan anggaran, di mana perluasan penggunaan teknologi dapat meningkatkan risiko terkait keamanan data dan potensi *fraud* (Hardinto *et al.*, 2020).

Menghadapi tantangan etika ini, berbagai strategi diperlukan agar pengelolaan anggaran tetap mematuhi prinsip-prinsip etika dan integritas. Fitriani *et al.* (2022) menyoroti peran kepemimpinan etis sebagai kunci untuk mendorong perilaku konsisten dan moral di seluruh organisasi. Pemimpin yang mengusung kepemimpinan transformasional dan mengabdikan dapat menjadi pionir dalam mengubah budaya organisasi menjadi lebih etis (Jahidi & Hafid, 2017). Di Indonesia sendiri Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2022 telah menyusun seperangkat pedoman yang menjadi panduan dan kriteria dalam

menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik yang disebut Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI). Nilai-nilai dasar yang diusung dalam pedoman tersebut antara lain: kepemimpinan, etika dan kejujuran, supremasi hukum, transparansi, independensi, akuntabilitas, amanah, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Pentingnya pendidikan formal dalam pencegahan korupsi dan penanaman nilai etika juga tidak dapat diabaikan (Sujadi *et al.*, 2022). Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menjadi agen kontrol yang efektif dalam memonitor perilaku pengelola anggaran negara. Implementasi etika dalam sektor pemerintahan menjadi hal penting baik secara filosofis maupun pragmatis (Abas, 2017).

Dalam menghadapi tantangan etika pengelolaan anggaran di era transformasi digital, dibutuhkan sinergi antara kepemimpinan yang etis, penerapan kebijakan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat. Hanya melalui kerjasama ini, pengelolaan anggaran negara dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya di tengah arus transformasi digital yang terus berlanjut.

Kesimpulan

Sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keamanan data dalam pengelolaan anggaran negara di era transformasi digital menyoroti beberapa aspek krusial. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adopsi teknologi informasi telah membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, namun juga membawa tantangan etika, terutama terkait dengan keamanan data.

Dalam menghadapi tantangan ini, kepemimpinan etis muncul sebagai faktor kunci untuk menjaga integritas dan mengarahkan perubahan budaya organisasi. Pemahaman risiko keamanan data, penerapan kebijakan yang ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif dari transformasi digital dalam pengelolaan anggaran.

Meskipun langkah-langkah tersebut telah diidentifikasi, perlu diperhatikan bahwa tantangan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada aspek-aspek berikut. Pertama, pentingnya

melibatkan pihak pengembang teknologi digital dalam pengembangan solusi keamanan data yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Kedua, evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan peninjauan terkini terkait etika dan integritas dalam aspek teknologi keuangan dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektivitas dan keberlanjutan implementasinya. Terakhir, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, dalam meningkatkan transparansi dan keamanan data dalam pengelolaan anggaran negara.

Dengan demikian, saran penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pandangan holistik terkait tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola anggaran negara di era digital, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk memastikan integritas, transparansi, dan keamanan data tetap terjaga dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara.

Daftar Pustaka

- Abas, A. (2017). Urgensi Etika Dalam Tata-Kelola Pemerintahan (Governance). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 79–89. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p79-89>
- Afriana, W., Susetiyana, H., Putri, O., & Azis, H. (2020). E-Government Effectiveness in Combating Corruption and Improving Public Services. *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28–42. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i1.23944>
- Agustini, P. (2021, January 17). *Empat Pilar Literasi untuk Dukung Transformasi Digital*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/01/empat-pilar-literasi-untuk-dukung-transformasi-digital/>
- Briando, B., & Purnomo, A. S. (2019). Etika Profetik bagi Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 342–364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10020>
- DJPb Kemenkeu. (2022, December 14). *Teknologi Digital Bantu Pengelolaan Keuangan Negara Makin Akuntabel dan Berkualitas*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4022-teknologi-digital-bantu-pengelolaan-keuangan-negara-makin-akuntabel-dan-berkualitas.html>
- Fitriani, N., Minanurohman, A., & Firmansah, G. L. (2022). Kepribadian Serakah (Greed) sebagai Tantangan Etika dan Kepemimpinan dalam Profesi Akuntan Manajemen. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(2), 295–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i2.1590>
- Gafar, T. F. (2017). Manajemen Perubahan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan Di

- Indonesia (Sebuah Pemikiran Dalam Menyongsong Peralihan e-Government Menjadi e-Governance). *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 153–170.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14726>
- Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi Gelap Pemimpin Dalam Memotivasi Tindakan Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 334–354.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20>
- Irmayanti, Lewangka, O., Mardjuni, S., & Muhibuddin, A. (2021). *Etika Profesi & Kompetensi Auditor* (S. Bahri & B. Madiung, Eds.). Pusaka Almada.
- Jahidi, I., & Hafid, M. (2017). Transformasional Leadership dan Servant Leadership: Tantangan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Global. *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 219–231.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14730>
- Jumading, J. (2021, November 3). *Transformasi Digital untuk Efisiensi Anggaran Pemerintah*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/artikel/2865-transformasi-digital-untuk-efisiensi-anggaran-pemerintah.html>
- Mufti, Moh. I., Kurnia, I., & Nanang, H. (2019). The Challenges of Bureaucratic Reformation in Indonesia (Public Service Perspective). *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 3(2), 79–89.
- Mulyawan, R., & Mariana, D. (2016). Profesionalisme Aparat dan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat. *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 201–219.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.9940>
- Nastoto, E. P. S. (2023). *Peran Kepemimpinan Dalam Keberhasilan Transformasi Digital*.
https://babelprov.go.id/artikel_detil/peran-kepemimpinan-dalam-keberhasilan-tranformasi-digital
- Nikmatuniayah. (2015). Kinerja dan Etika Pelayanan Sektor Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 341–511.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6030>
- Nukman, I. (2014). Tantangan Kepemimpinan : Pengantar Menelusuri Konsep Kepemimpinan Indigeneous. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 11(2).
<https://doi.org/10.18860/psi.v11i2.6384>
- Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*. (2022).
- Sujadi, E., Meditamar, M. O., Yandri, H., & Setiawan, M. E. (2022). Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Kebijakan dan Praktik di Indonesia, Malaysia dan Singapura. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 133–149.
<https://doi.org/10.21831/jpka.v13i2.47782>
- Sumarto, R. H. (2017). Etika Publik bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah.

Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 112–120.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1929>

Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161.
<https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161>

Tantyo, M. G. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung. *Corruptio*, 1(2), 117–128.
<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2098>

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (1st ed.). Kencana.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.